

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan politik untuk perempuan merupakan hal yang sangat penting dalam proses demokrasi suatu bangsa. Menurut data statistik 2004, jumlah penduduk Indonesia mayoritas perempuan, yaitu lebih dari 100 juta. Walaupun penduduk perempuan lebih dari 100 juta, tetapi hingga saat ini kaum perempuan Indonesia belum mendapatkan tempat yang sejajar dengan kaum laki-laki, terutama dalam persaingan politik. Hal ini terjadi karena budaya patriarki yang menjadi dasar kehidupan manusia umumnya di dunia, dalam kontestasi politik acap kali perempuan kurang memiliki modal berargumentasi dengan kaum laki-laki.

Budaya patriarki adalah budaya yang mengutamakan peran laki-laki dalam mengatur kehidupan, hal ini merupakan salah satu faktor dasar yang meminggirkan perempuan, di antaranya dalam hal memperoleh kesempatan persaingan, khususnya persaingan politik. Secara ekstrim wacana yang berkembang menyatakan bahwa wilayah politik perempuan adalah di dapur.

Di lihat dari konteks kontemporer dewasa ini, maka sudah waktunya perempuan berperan serta lebih optimal di dunia politik, mengingat kemampuan mereka tidak kalah pentingnya dalam menduduki jabatan

publik tertentu. Dengan kata lain, masih dalam koridor kepentingan perempuan untuk memperjuangkan nasib mereka melalui saluran politik pemerintah yang sangat strategis.

Dalam konteks di Nusa Tenggara Timur, keterwakilan perempuan di lembaga DPRD hasil pemilu 9 April 2014 lalu bertambah dari hasil pemilu lima tahun lalu. Dari 65 kursi yang diperebutkan, keterwakilan perempuan sebanyak enam orang, atau bertambah tiga orang dari pemilu sebelumnya yang hanya menempatkan tiga orang.

Pada hasil Pileg 2014 di Lhokseumawe. Dari alokasi 25 kursi DPRK, berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah diplenokan KIP pada 19 April 2014, diprediksikan hanya dua calon legislatif perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan Lhokseumawe.

Dua calon legislatif perempuan tersebut, Nurul Akbari yang diusung Partai Gerindra melalui Daerah pemilihan I (Kecamatan Banda Sakti), dan Roslina dari Partai Demokrat Daerah pemilihan III (Kecamatan Blang Mangat).

Asumsi bahwa anggota legislatif di Lampung hampir sama dengan di daerah Indonesia lainnya dimana kuota perempuan di parlemen tidak memenuhi afirmatif 30 % untuk mewakili keterwakilan perempuan.

Kuota 30 persen perempuan di DPRD Lampung idealnya terpenuhi. Dari 85 anggota DPRD Lampung, seharusnya ada 25 anggota legislatif perempuan. Jika kurang dari jumlah tersebut, artinya perempuan belum mendapat tempat dalam pilihan politik masyarakat Lampung. Hal ini disebabkan

beberapa hal. Misalnya, perempuan di Lampung masih dimarjinalkan dalam politik atau hanya sebatas pelengkap.

Setelah diimplementasi melalui dua kali pemilu, kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% perempuan menunjukkan hasilnya. Apabila Pemilu 2004 menelorkan perempuan 11% di DPR, 22 % di DPD, 12% di DPRD provinsi, dan 6% di DPRD kabupaten/kota, maka Pemilu 2009 menambah perempuan menjadi 18% di DPR, 27% di DPD, 16% di DPRD provinsi, dan 12% di DPRD kabupaten/kota. (sumber : rumahpemilu.org)

Fakta di lapangan menunjukkan perkembangan yang mendekati kata ideal. Meskipun sejarah keterlibatan perempuan Indonesia dalam politik sudah terjadi sejak ratusan tahun silam, angka partisipasi perempuan di parlemen ternyata masih terbilang rendah. Berikut adalah kursi DPR yang dimiliki perempuan dan periode waktu seperti dikutip dari laporan IPU (Inter-Parliamentary Union):

Tabel 1
Periode Waktu dan Kursi DPR Yang Dimiliki Perempuan

No.	Tahun	Jumlah Perempuan	Persen (%)
1.	Pemilu tahun 1955		5,9%
2.	Pemilu tahun 1971	33 dari total 460	7,17%
3.	Pemilu tahun 1977	34 dari total 460	7,39%
4.	Pemilu tahun 1982	38 dari total 460	8,26%
5.	Pemilu tahun 1987	57 dari total 500	11,4%
6.	Pemilu tahun 1992	61 dari total 500	12,2%
7.	Pemilu tahun 1997	57 dari total 500	11,4%
8.	Pemilu tahun 1999	40 dari total 500	8%
9.	Pemilu tahun 2004	62 dari total 550	11,2%
10.	Pemilu tahun 2009	104 dari total 560	18,6%
11.	Pemilu tahun 2014	79 dari total 410	14%

Akan tetapi peningkatan tersebut mendatangkan masalah baru. Hasil Pemilu 2009 menunjukkan, 25% adalah figur populer dan 41% adalah anggota dinasti politik. Dominasi dua latar belakang itu tentu tidak jadi masalah apabila mereka mampu mengemban baik fungsi-fungsi legislatif. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pada titik inilah implementasi kebijakan afirmasi perlu dievaluasi.

Kehadiran 15 perempuan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD Provinsi Lampung secara keseluruhan. Karena kinerja dewan bersifat kolektif, bersama-sama melalui fraksi partai, bukan individu. Meski demikian, 15 calon legislatif wanita terpilih ini nantinya bisa saja melakukan persaingan perempuan melalui legislatif ataupun partai politik.

Tabel 2
Jumlah anggota legislatif perempuan di DPR, DPD, dan DPRD
Provinsi Lampung

No.	Lembaga Legislatif	Jumlah Perempuan	Persentase (%)
1.	DPR RI	79 orang	14 %
2.	DPD	118 orang	12,47%
3.	DPRD Provinsi Lampung	15 orang	17,64%

Sumber: web compas.com diakses pada Rabu, 23 Juli 2014

Tabel 3
Jumlah Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kab/Kota Di Lampung

No.	DPRD Kab/Kota	Jumlah	Persentase (%)
1.	Dapil 1 (Bandar Lampung)	2	18,18 %
2.	Dapil 2 (Lampung Selatan)	1	10 %
3.	Dapil 3 (Metro, Pesawaran, Pringsewu)	4	36,36 %
4.	Dapil 4 (Lampung Barat, Tanggamus)	-	-
5.	Dapil 5 (Lampung Utara, Way Kanan)	2	18,18 %
6.	Dapil 6 (Tulang Bawang, Tulang Bawang)	2	20 %

	Barat, Mesuji)		
7.	Dapil 7 (Lampung Tengah)	2	16,66 %
8.	Dapil 8 (Lampung Timur)	2	20 %

Sumber: web saibumi.com diakses pada Kamis 24 Juli 2014

Ketidakhadiran perempuan secara terbuka juga diakibatkan oleh ketidaknyamanan kaum laki-laki terhadap aktivitas politik perempuan. Kehadiran perempuan cenderung mengganggu 'status quo' kaum laki-laki yang selama ini mendominasi banyak sektor dalam kehidupan, salah satunya sektor politik. Perempuan yang dianggap 'pintar' cenderung menjadi ancaman bagi realitas laki-laki. Ketidaknyamanan laki-laki atas kesempatan yang semakin luas dalam wilayah publik semakin menegaskan bahwa memang tidak mudah bagi kaum perempuan untuk beraktivitas di politik tanpa dukungan hal-hal yang disebutkan di atas; terutama dukungan finansial dan partai politik. Kelebihan kaum perempuan seperti berpendidikan, pengaruh keluarga/keturunan yang dikenal masyarakat dan kecukupan finansial menjadi modal kuat untuk terjun ke wilayah publik seperti politik.

Aktivitas politik kaum perempuan walau sudah didukung oleh undang-undang partai politik dan undang-undang Pemilu yang menganjurkan keterwakilan perempuan didukung oleh partai politik berdasarkan kebijakan "affirmative action, kuota 30 persen", akan tetapi kenyataannya persoalan berkaitan dengan aktivitas politik perempuan tetap kuat meliputi politik praktis kaum perempuan. Kebijakan tersebut tetap tidak mudah dijalankan pada awalnya karena munculnya pro dan kontra baik dalam kehidupan

sosial budaya maupun politik. Tidak semua lapisan masyarakat menerima ketentuan tersebut. Dalam wilayah politik juga banyak yang kurang bahkan tidak sepatutnya dengan ketentuan kuota 30 persen.

Menariknya, finansial menjadi utama karena pembiayaan ikut menentukan banyak hal dalam proses politik. Seseorang dapat timbul kepercayaan dirinya jika perempuan tersebut mempunyai '*uang yang cukup*' membiayai aktifitas politik mereka. Bahkan uang yang ada mampu membuat partai politik mencalonkan perempuan tersebut. Walaupun kondisi seperti ini tidak diharapkan muncul dalam kasus perempuan.

Perempuan umumnya tidak menguasai ekonomi yang memadai dan hal itu menjadi alasan terbatasnya sumber daya perempuan. Hal itu dipersulit juga dengan ketidakpercayaan partai politik mengenai kemampuan perempuan untuk mendukung keuangan partai. Kekuatan finansial seringkali mampu mengalahkan kualitas seorang kandidat, karena partai politik mensyaratkan seorang kader atau kandidat mampu membiayai kampanye dan proses politik masing-masing sekaligus mampu mendukung pembiayaan partai politik. Tidak dapat dinafikan bahwa kegiatan-kegiatan partai membutuhkan pembiayaan dalam realisasinya.

Uang atau kekuatan finansial menjadi krusial dalam proses politik. Mengingat pembiayaan politik semakin hari bertambah mahal bahkan hampir tidak bisa dilaksanakan proses politik tanpa dukungan finansial.

Pada dasarnya kemenangan anggota legislatif perlu adanya dukungan riil politik pada tingkat akar rumput masyarakat, adanya tim pemenangan dan strategi pemenangan dan motivasi yang kuat ada pada diri caleg untuk menjadi anggota legislatif.

Salah seorang calon legislatif perempuan daerah pemilihan Lampung Timur Asmara Dewi memperoleh suara 38.675 ini fenomenal sebab tidak ada calon legislatif yang bisa memperoleh batas maksimal BPP, strategi pemenangan kata kuncinya yakni menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk bersosialisasi.

Persaingan di partai PAN perlu dicermati dalam kontestasi antar calon legislatif dimana dalam penjaringan yang dilakukan partai sangat signifikan dimana tingginya kuota 30% dan melihat kursi yang ada calon legislatif daerah pemilihan Lampung Timur yakni jumlah wanita di Dapil ini ada 4 diantaranya ibu Asmara Dewi dan Yulia Hasimah, Yuniarsih Rahayu, Dewi Fentriati, sehingga mereka bersaing dengan calon legislatif laki-laki yakni Saad Sobari, Herman Simono, Saiful Ahmad, Armin Hadi, Abung Sutrisno, Marzuki Yazid.

Melihat dari mekanisme yang sesuai AD/ART partai PAN sangat jauh dari idealis dan sistematis internal yang mengutamakan kader struktural menduduki nomor urut jadi dalam pencalagean ini terlihat dari nomor urut Bu Yulia Hasimah pada nomor 4 yang diketahui sangat konstruktif untuk partai, yang terjadi kompromi (transaksional) di internal dalam partai.

Pada pemilihan umum 9 April 2014 persaingan terjadi antara Asmara Dewi nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 38.675 mengalahkan Saad Sobari 11.342 suara dan Yulia Hasimah sebanyak 1.484 suara. Dalam perolehan suara terbanyak di partai PAN sehingga terpilih Asmara Dewi sebagai anggota legislatif Provinsi Lampung periode 2014-2019.

Strategi sosialisasi yang dilakukan untuk mengumpulkan basis masa yakni dengan tidak memanfaatkan PNS. Hanya guru-guru PAUD dan non PNS dari kota hingga desa yang dipakai. Dengan alasan guru-guru PAUD masih dibawah sejahtera dengan dana insentif yang sedikit. Menghadiri undangan-undangan pengajian untuk menjadi narasumber.

Eva Dwiwana di partai PDIP bersaing dan meraih suara 19.818 yang mengalahkan perolehan suara calon legislatif PDIP nomor urut 1 Aprilati yang hanya meraih suara 7.005 dan Arianto Suparno sebanyak 6.053 suara. Namun Aprilati tetap dapat lolos ke DPRD Lampung mengingat PDI Perjuangan dapat meraih dua kursi dari Bandar Lampung ini. Di dalam daerah pemilihan 1 Bandar Lampung yakni jumlah wanita di Dapil ini ada 4 diantaranya ibu Aprilati dan Maisari Berti, Agustinawati, sehingga mereka bersaing dengan calon legislatif laki-laki di antaranya Igantius Agus Suardaya, Aprianto Suparno, Dahlan Anwar, Tahura Malagano, Hidayat, Haposan Hutagalung.

Pada kemenangannya ini diketahui Eva Dwiwana sebagai ketua pengajian Rakhmad Hidayat mampu memobilisasi massa untuk datang kepengajian serta pernah menjabat ketua partai Demokrat kota Bandar Lampung yang

akhirnya memutuskan mundur menyusul kepengurusan tak jua dikukuhkan dan akhirnya merapat ke partai PDIP yang memberikan ruang politik luas.

Basis massa suara dari kedua calon legislatif ini diketahui terdongkrak karena suara faktor dari suami dimana keduanya pimpinan kepala daerah, Asmara Dewi sebagai istri Bupati Lampung Timur Erwin, dan Eva Dwiana sosok istri dari Walikota Bandar Lampung. Keduanya selalu ada dikegiatan suami menjalankan tugas sehingga mampu menarik simpati masyarakat di dapilnya. Begitupun peran dari sosok suami dalam kemenangan dimana diketahui memberikan jaringan dan dorongan motivasi yang kuat.

Pada pemilihan umum 2014 lalu adanya tantangan-tantangan dalam dunia politik diantaranya hasil rekapitulasi panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dihimpun tim suara partai Golkar 5.889, suara Dwie Aroem Hadiatie 2.671, dan Reza Pahlevi 1.526. Tapi, setelah rekapitulasi tingkat kabupaten, suara partai Golkar turun menjadi 2.600, Aroem tetap 2.671, dan Reza naik drastis menjadi 9.663. Selisih inilah yang menjadi bahan laporan Aroem ke Bawaslu.

Sementara dari sampel penggelembungan suara penghitungan suara ulang semalam, di Kecamatan Batuketulis, suara Reza yang semula 21 menjadi 346.

Kemudian di Balik bukit, selain Reza, suara berubah adalah milik caleg nomor urut 4 Irsanudin Sagala yang berkurang. Dari seharusnya 69, suara Irsanudin hanya tersisa 4. Sementara suara Reza dari 69 menjadi 844. Di

Sukau, suara Reza dari 39 menjadi 530, Krui Selatan dari 6 menjadi 116, dan Pesisir Tengah dari 49 menjadi 281.

Penghitungan ulang yang dibacakan dalam rapat pleno ini pun menjadi perhatian peserta pleno. Suasana yang tadinya menghangat karena ada sejumlah saksi parpol menolak pembukaan kotak suara, langsung berubah. Saksi dan undangan pun antusias dan menyoraki komisioner KPU Lambar yang membacakan rekapitulasi ulang.

Sayangnya, pembetulan data ditunda karena Bawaslu tidak menemukan data pembanding untuk Kecamatan Sekincau. Sehingga, hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti jumlah selisih suara yang diduga digelembungkan dan berpindah itu. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono memberikan kesempatan Bawaslu untuk mencari data itu.

Di ketahui keduanya merupakan anak dari tokoh politikus Lampung yakni Alzier Dianis Tabrani, ia mampu menarik simpati masyarakat dengan kampanye media sosial, dimana ia bersaing dengan adik tirinya yakni Reza Pahlevi yang di dukung penuh oleh Alzier selaku orang tua mereka. Tim mendirikan posko relawan sahabat Aroem, mengadakan *road show* di berbagai daerah, silaturahmi keluarga, tokoh adat, koordinator kecamatan tim relawan Aroem di desa Banjar Negeri, kecamatan Gunung Alip Tanggamus, sosialisasi dan pengajian akbar.

Ketiga anggota legislatif ini telah lolos dalam verifikasi data di KPU untuk menduduki kursi parlemen mewakili perempuan Lampung. Secara langsung

persaingan politik sudah dirasakan sebab melalui mekanisme partai politik diantaranya Asmara Dewi dari PAN, Eva Dwiana dari PDI Perjuangan, dan Dwie Aroem Hadiatie dari Golkar.

Penelitian yang sejenis Gender Dan Perilaku Memilih: Sebuah Kajian Psikologi Politik Rahmaturrizqi, Choirun Nisa, dan Fathul Lubabin Nuqul Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ada perkembangan menarik dari psikologi politik, terutama dalam upaya perempuan untuk bersaing dalam arena politik. Sampai pertengahan tahun 2007, sedikitnya 82 perempuan tercatat mengikuti pemilihan di 232 daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Dari data tersebut, 26 perempuan (30,76%) terdaftar sebagai calon pemimpin daerah dan 57 wanita (69.24%), terdaftar sebagai wakil pemimpin daerah, meskipun hanya delapan perempuan yang berhasil terpilih sebagai pemimpin daerah dan 11 terpilih sebagai wakil pemimpin daerah (Arifin, 2008). Pemilihan langsung seperti yang terjadi saat ini membuat calon harus mengikuti "kepentingan" pemilih.

Namun, upaya untuk memahami perilaku, perasaan dan pemikiran pemilih tidak selalu mudah. Cara-cara lama dengan memberikan sumbangan ekonomi dianggap tidak terlalu kuat lagi dalam mempengaruhi suara pemilih. Salah satu solusi yang mungkin adalah melakukan analisis kebutuhan pemilih. Untuk memenuhi kebutuhan pemilih tidak selalu mudah karena ada perbedaan karakter antara masyarakat, jenis kelamin dan

individu yang mempengaruhi perilaku memilih mereka. Penelitian ini melibatkan 90 mahasiswa (45 perempuan dan 45 laki-laki).

Data dikumpulkan dengan cara memberikan cerita skenario tentang pemilihan pemimpin daerah (bupati) di mana setiap subjek harus memilih pria atau wanita sebagai pemimpin, atau tidak memilih sama sekali. Setiap alternatif jawaban, subjek diminta untuk memberikan alasan. Analisis data menggunakan tematik dan tabulasi silang kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek yang memilih pria sebagai pemimpin sebanyak 68 orang atau 75,56%, dan yang memilih perempuan sebagai pemimpin hanya 12 orang atau 13,33%. Subjek yang abstain berjumlah 11 orang atau 11,11%. Hasil ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih perempuan, lebih cenderung memilih pria sebagai pemimpin. Dari berbagai alasan yang diungkapkan oleh subjek dapat disimpulkan bahwa hal ini terjadi karena sebagian besar subjek, termasuk perempuan, percaya bahwa pria lebih berhak dan pantas untuk menjadi pemimpin dibanding perempuan.

Jurnal perempuan dalam pemilu 2009 : refleksi kritis oleh Arie Sujito. Pemilu legislatif yang digelar 9 April 2009 lalu, mencuatkan isu soal representasi perempuan dalam arena politik. Sebagian besar pihak menilai, kondisi budaya masyarakat dan kekuasaan yang masih patriarkhi mengharuskan agenda kesetaraan gender menjadi prioritas dalam penegakan demokrasi Indonesia.

Faktanya, tuntutan perhatian pada aspirasi dan hak-hak perempuan dalam dunia politik kian membuahkan hasil, meskipun dalam rentang yang belum

optimal. Kesepakatan politik yang berisi prasyarat bagi parpol untuk memasukkan keterwakilan perempuan sebesar 30% atas calon anggota legislatif (caleg) yang diajukan, menunjukkan terobosan menarik.

Desakan semacam ini, meskipun belum sepenuhnya ditaati oleh parpol secara keseluruhan, hendaknya dipahami sebagai bagian dari fase perjalanan advokasi atas kesetaraan gender dalam rute demokratisasi.

Mari kita mengupas kaitan perempuan dengan soal pemilu 2009 lalu. Mengapa perempuan perlu mendapat perhatian serius dalam pemilu 2009? Jika dikalkulasi secara demografis, perempuan berjumlah lebih dari 55% dari populasi jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu, dari segi jumlah pemilih yang berhak dalam pemilu, perempuan juga lebih besar dibandingkan laki-laki. Artinya, perempuan merupakan basis suara yang begitu besar, dan terlalu sayang jika tidak menjadi sasaran strategis untuk meraih dukungan. Hanya saja, kondisi saat ini memang masih ironis. Betapapun basis perempuan dalam pemilu demikian besar, nyatanya derajat keterwakilan perempuan secara formal dalam parpol sangat kecil dan terbatas. Berdasarkan informasi komisi pemilihan umum (pusat maupun daerah), bahwa parpol-parpol peserta pemilu sebagian besar tidak mentaati keharusan memenuhi kuota perempuan.

Alasan umum yang dilontarkan pengurus partai politik adalah, sulitnya mencari kader-kader perempuan untuk duduk menjadi calon legislatif. Padahal, jika struktur parpol lebih dibuka dan dikelola secara demokratis, partisipasi perempuan dalam legislatif semakin besar dan meningkat.

Sedikitnya ada 5 soal yang menjadi penyebab mengapa masalah keterwakilan perempuan terbatas dalam caleg; pertama, model kepengurusan parpol yang masih dikelola secara oligarkhis, dimana mereka yang berposisi strategis cenderung memblokir kelompok-kelompok potensial (termasuk perempuan) dalam mobilitas vertikal; kedua, sistem kaderisasi yang buruk di tubuh parpol, dimana proyeksi kepemimpinan tidak memperlihatkan sistem yang terstruktur; ketiga, makin pragmatis manajemen parpol diperlihatkan dalam bentuk kecenderungan mengambil keputusan politik berorganisasi hanya mendasarkan kemampuan uang (ekonomisasi politik), dengan akibat terpinggirkannya komitmen dalam rangka membesarkan partai politik dan ideologi; keempat, kultur yang masih bersemayam gaya politik patriarkhi, dimana hal itu mempersulit kaum perempuan memasuki publik; kelima, masih terbatasnya daya dukung gerakan perempuan yang secara solid menjadikan perjuangan politik sebagai prioritas.

Di Indonesia persaingan politik perempuan dibuktikan dengan walikota Surabaya yang mampu memberikan kepercayaan ke masyarakat bahwa perempuan mampu duduk di eksekutif dalam memerintah pun bersifat mengayomi, selain itu ketua umum Megawati Soekarno Putri menjalani beberapa periode memimpin partai besar dengan pesaing dari laki-laki. Sebelum tersangkut kasus korupsi Ratu Atut Khoisiah merupakan gubernur perempuan pertama khususnya di Banten dengan segala motivasi kuat dan dukungan sosial mampu keluar sebagai kontestan pemenang pemilu Banten dengan hampir dua periode.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dituangkan dalam pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana persaingan politik pada proses terpilihnya Asmara Dewi, Eva Dwiana, Dwie Aroem Hadiatie sebagai calon legislatif di partainya masing-masing?
2. Apa strategi sosialisasi dan kampanye yang digunakan Asmara Dewi, Eva Dwiana, Dwie Aroem Hadiatie?
3. Bagaimana peranan keluarga (ayah, suami, dll) dalam mencapai kemenangan Asmara Dewi, Eva Dwiana, Dwie Aroem Hadiatie?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui persaingan politik pada proses terpilihnya Asmara Dewi, Eva Dwiana, Dwie Aroem Hadiatie sebagai calon legislatif di partainya masing-masing!
2. Untuk mengetahui strategi sosialisasi dan kampanye yang digunakan Asmara Dewi, Eva Dwiana, Dwie Aroem Hadiatie!
3. Untuk mengetahui peranan keluarga (ayah, suami, dll) dalam mencapai kemenangan Asmara Dewi, Eva Dwiana, Dwie Aroem Hadiatie!

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini nantinya diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu politik lokal dan otonomi daerah.
- b. Secara akademis dapat menambah khasanah bacaan di lingkungan Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Lampung (UNILA) khususnya civitas akademika UNILA pada umumnya serta semua pihak-pihak yang berkepentingan. Tentunya penelitian ini menyumbangkan khazanah pengetahuan sebelumnya tentang persaingan politik di tingkat lokal khususnya perempuan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang politik khususnya tentang politik perempuan dan terealisasinya isu gender dan politik dalam masyarakat. Kaum perempuan, harus lebih bersatu dalam perjuangan politik yang dilakukan, mempunyai strategi yang jelas, dan konsisten dengan perjuangan yang dilakukan sehingga tujuan perjuangan yang sesungguhnya tercapai. Perjuangan bukan hanya untuk kepentingan pribadi-pribadi saja, melainkan untuk kepentingan perempuan dan masyarakat. Masyarakat, masyarakat khususnya perempuan lebih menggalang kebersamaan dan kepercayaan terhadap aktivitas politik

perempuan. Perempuan juga harus menawarkan pola pendekatan dan pelayanan yang berbeda dibandingkan laki-laki agar kehadiran kaum perempuan disukai dan dikehendaki sebagai pemimpin di tengah masyarakat.

- b. Sebagai tambahan wacana politik untuk turut serta membangun perpolitikan nasional sebagai warga negara yang memiliki kesadaran politik. Partai politik, sebagai satu-satunya pintu masuknya kader partai yang mencalonkan diri, maka partai politik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki seharusnya mendukung aktivitas politik perempuan secara maksimal agar perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki selama ini.
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di bidang persaingan politik perempuan khususnya di provinsi Lampung.